



PEMERINTAHAN  
KOTA SURABAYA



# Executive Summary LPPD Infografis

---

BAGIAN PEMERINTAHAN &  
KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA

# 2023

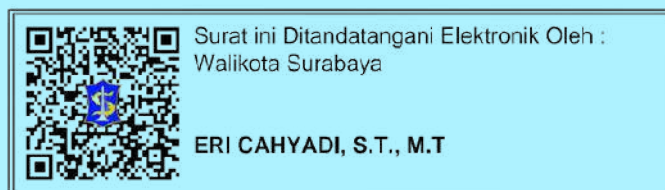
# Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/168/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surabaya, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023.

Laporan ini menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan berbagai permasalahan yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun berikutnya. Prestasi dan keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemacu Pemerintah Kota Surabaya untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk langkah kedepan.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, 27 Maret 2024





# Daftar Isi

**Kata Pengantar** 02

---

**Daftar Isi** 03

---

**Pendahuluan** 05

---

**Capaian Kinerja Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah** 15

---

Capaian Kinerja Makro 15

---

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan 22

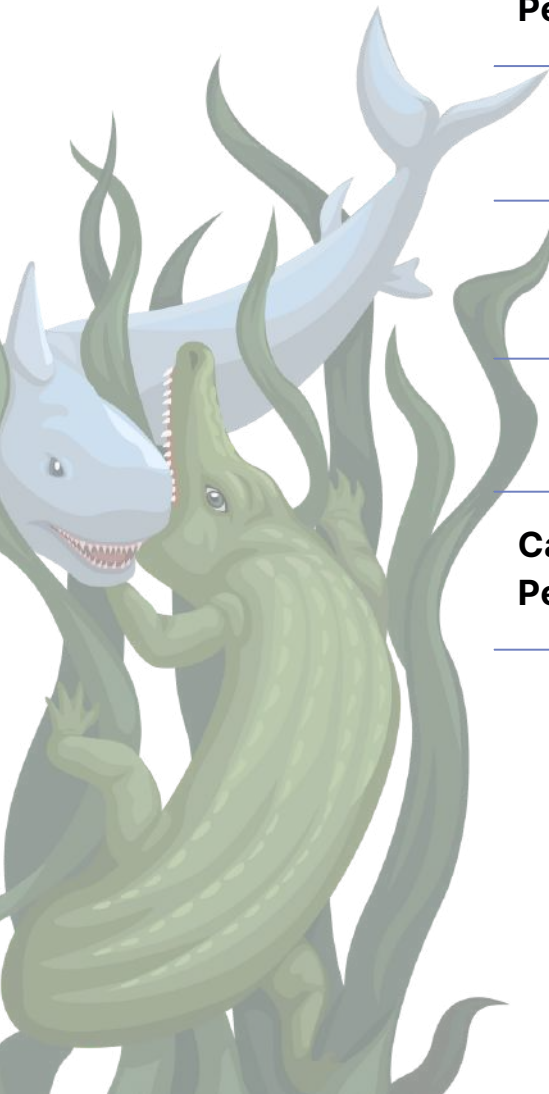
---

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 46

---

**Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas  
Pembantuan** 64

---





# Daftar Isi

<b>Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>74</b>
Urusan Pendidikan	66
Urusan Kesehatan	69
Urusan Pekerjaan Umum	76
Urusan Perumahan Rakyat	79
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82
Urusan Sosial	86
Program dan Kegiatan	89
<b>Penutup</b>	<b>92</b>



# PENDAHULUAN



## Latar Belakang

Dalam melaksanakan kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surabaya yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

## Undang-Undang Pembentukan Daerah

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022);
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 55);
- Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 131).

## Gambaran Kota Surabaya dalam Angka

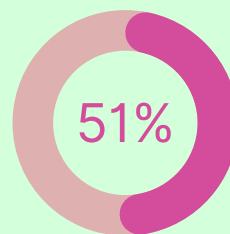


# 3.009.286

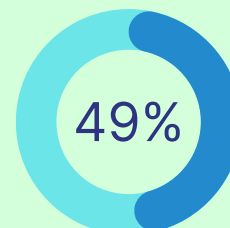
Jumlah Penduduk



Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 meningkat dari Tahun 2022 yaitu 2.987.863 jiwa



1.518.928



1.490.358

# 13.301

Jumlah Aparatur Sipil  
Negara (ASN) Kota Surabaya  
Tahun 2023



**20.40%**  
Pegawai  
Pemerintahan  
dengan Perjanjian  
Kerja (PPPK)  
sebanyak **2.713**

**0.01%**  
Calon Pegawai  
Negeri Sipil (CPNS)  
sebanyak **1**

**79.60%**  
Pegawai Negeri  
Sipil (PNS)  
sebanyak  
**10.587**



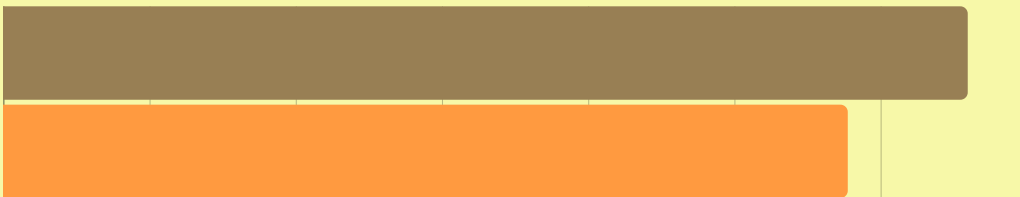
► Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah



# PENDAPATAN

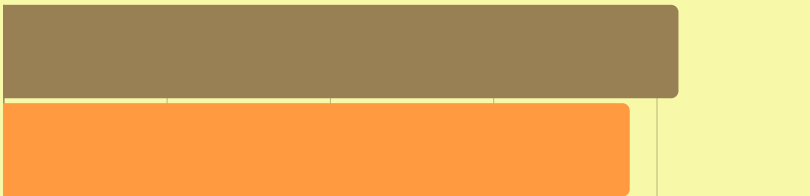
**Pendapatan Asli Daerah** 87,55 %

■ Anggaran ■ Realisasi



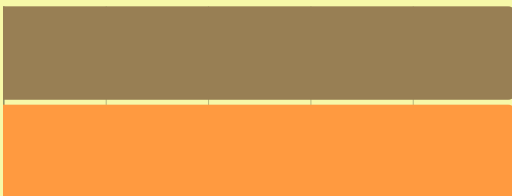
**Pendapatan Transfer** 92,78 %

■ Anggaran ■ Realisasi



**Lain-lain Pendapatan Sah** 0 %

■ Anggaran ■ Realisasi



# ► Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

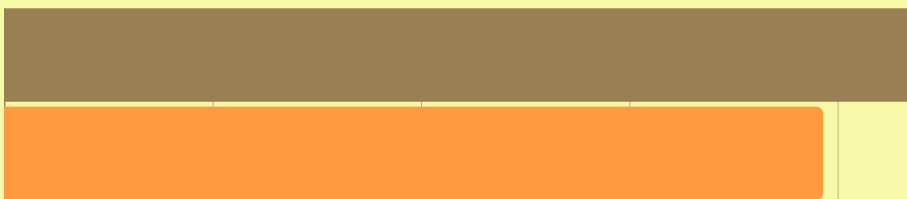


## BELANJA

### Belanja Operasi

89,71 %

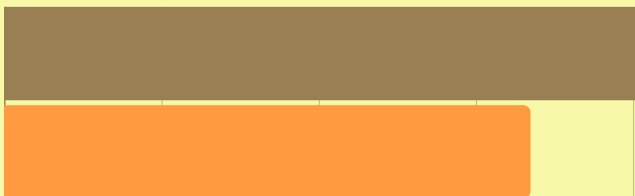
■ Anggaran ■ Realisasi



### Belanja Modal

92,78 %

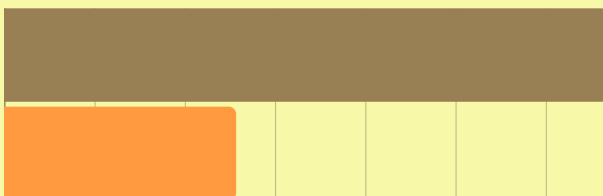
■ Anggaran ■ Realisasi



### Belanja Tidak Terduga

38,31 %

■ Anggaran ■ Realisasi



► Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah



## PEMBIAYAAN

### Penerimaan Daerah

100 %

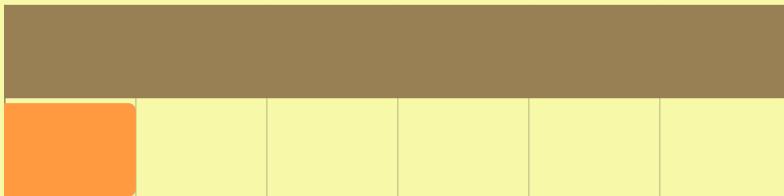
■ Anggaran ■ Realisasi



### Pengeluaran Daerah

16,67 %

■ Anggaran ■ Realisasi



### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Rp.208.806.451.530,06



# VISI



Gotong Royong  
Menuju Surabaya Kota  
Dunia yang Maju,  
Humanis dan  
Berkelanjutan

# MISI

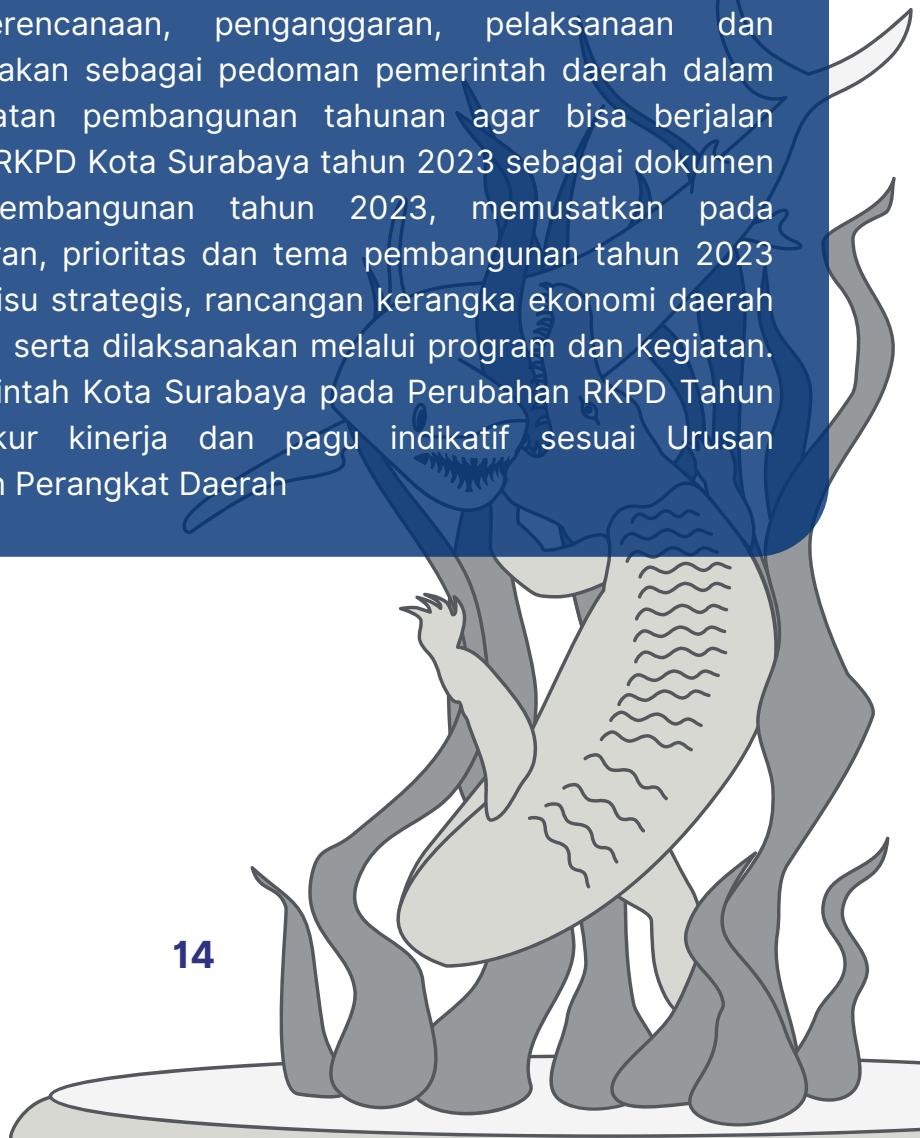


1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

# Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan



Penyusunan dokumen Perubahan RKP Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, guna keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Perubahan RKP disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Perubahan RKP Kota Surabaya tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKP Tahun 2023 beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah





# Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



## Summary Capaian Kinerja Makro Tahun 2023

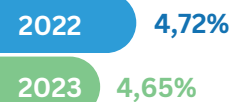
Capaian kinerja Kota Surabaya Pada Tahun 2023 menunjukkan **tren positif**, beberapa indikator makro mengalami peningkatan/penguatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya

### Indeks Pendapatan Manusia



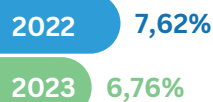
Perubahan **0.80%**

### Angka Kemiskinan



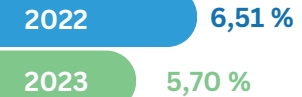
Perubahan **-1,48%**

### Angka Pengangguran



Perubahan **-11,28%**

### Pertumbuhan Ekonomi



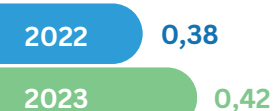
Perubahan **-12,44%**

### Pendapatan Perkapita



Perubahan **8,67%**

### Ketimpangan Pendapatan



Perubahan **9,02%**

# Indeks Pembangunan Manusia



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pengukuran IPM berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

## Indeks Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indeks Pembangunan Kota Surabaya	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Indeks Pembangunan Manusia	83,32	83,99	0,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Nilai IPM Kota Surabaya Tahun 2023 meningkat sebesar 0,80% yaitu dari 83,32 pada tahun 2022 menjadi 83,99 pada tahun 2023. Dengan nilai IPM tersebut, Kota Surabaya termasuk dalam kategori wilayah dengan IPM sangat tinggi.

# Angka Kemiskinan



Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari.

## Angka Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Angka Kemiskinan	4,72%	4,65%	-1,48 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 4,65%. Angka kemiskinan Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 1,48% yang artinya angka tersebut lebih baik dengan capaian tahun 2022.



# Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



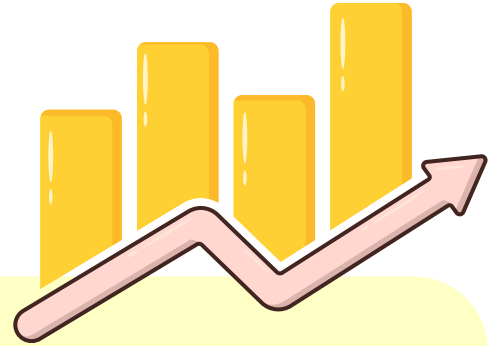
## Angka Pengangguran Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Angka Pengangguran	7,62%	6,76%	-11,28%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2023 angka pengangguran Kota Surabaya sebesar 6,76% atau mengalami penurunan sebesar 11,28% yang artinya angka tersebut lebih baik dengan capaian tahun 2022.

# Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian suatu wilayah digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu: 1) Menurut Pendekatan Produksi; 2) Menurut Pendekatan Pendapatan; 3) Menurut Pendekatan Pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Pertumbuhan Ekonomi	6,51 %	5,70 %	-12.44 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebesar 5,70 % atau mengalami penurunan sebesar 12.44 %.

# Pendapatan per Kapita

Pendapatan Regional merupakan Produk Regional Neto yaitu jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.



## Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	226.080,000	245.685,000	8,67 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

PDRB Per Kapita Kota Surabaya tahun 2023 sebesar 245.685,000 (ribu rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 8,67 % dari tahun 2022.

# Ketimpangan Pendapatan

Angka Indeks Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan. Angka Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Angka Indeks Gini 0 (nol) artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan Angka Indeks Gini 1 (satu) artinya ketimpangan sempurna.



## Angka Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Angka Indeks Gini	0,38	0,42	9,02 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023

Angka Indeks Gini Kota Surabaya tahun 2023 sebesar 0,42. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat ketimpangan sedang.



# Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



## ▶ Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



### Jumlah Indikator Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2023



Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan  
Indikator Kinerja Kunci Hasil

**102**



Indikator Kinerja Kunci  
Fungsi Penunjang

**19**

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja  
Kunci Hasil

### ► Urusan Pendidikan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Kesehatan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,31 %
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	98,39 %
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Kesehatan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	7,83 %
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantairawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	82,10 %
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	100 %
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100 %
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	99,55 %
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,41 %
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Perumahan Rakyat

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	100 %
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	-
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,59 %
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,22 %
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	5,26 Menit

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Sosial

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	0 %

### Urusan Tenaga Kerja

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,93 %
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,4479 Ket. D
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	13.58 %
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	105,11 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	52,02 %
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100 %
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,32

### ► Urusan Pangan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Pertanahan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Lingkungan Hidup

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$(58,49 \times 0,376) + (86,48 \times 0,405) + (42,65 \times 0,219) = 66,36$ IKA = Indeks Kualitas Air 58,49 IKU = Indeks Kualitas Udara 86,48 ITH = Indeks Tutupan Lahan 42,65
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	99,09 %
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51,18 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Perekaman KTP Elektronik	99,61 %
2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75,92 %
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	98,67 %
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	24,14 %

### ► Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,698
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	83,00 %
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,45 %

### ► Urusan Perhubungan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	100 %
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	VC Rata-Rata = 0,76

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Komunikasi dan Informatika

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101,37 %

### ► Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	9,21 %
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Penanaman Modal

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	7,67 %

### Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,14 %
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,87 %
3	Peningkatan prestasi olahraga	306 Medali/Penghargaan

### Urusan Statistik

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Persandian

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	68,06 %

### Urusan Kebudayaan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %

### Urusan Perpustakaan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	80,3
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,28

### Urusan Kearsipan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung-jawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	48,58 %
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Perikanan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	100,04 %

### Urusan Pariwisata

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	127,19 %
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	18,06 %
3	Tingkat Hunian Akomodasi	52,57 %
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	15,59 %
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	18,27 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Pertanian

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	655,61 %
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-100 %

### ► Urusan Kehutanan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/ Kota	Ada

### ► Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	0 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### ► Urusan Perdagangan

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	84,73 %
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	89,14 %
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	109,02 %

### ► Urusan Transmigrasi

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	-

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

### Urusan Perindustrian

No	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	26,64 %
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	0 %
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	133,14 %
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada</li> <li>• Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada</li> <li>• Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada</li> <li>• Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada</li> <li>• Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada</li> <li>• Informasi tenaga kerja (10%) Ada</li> <li>• Informasi Investasi (10%) Ada</li> </ul>

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

#### Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	16,78 %
2	Rasio PAD	60,09 %
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ada 3,483
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Ada 3,000
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	77,29%
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 10 WTP

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

#### Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	65,59 %
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	70,14 %
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	41,87 %

#### Fungsi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,02 %
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,14 %
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %

## Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

#### Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	-15,58 %
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	-12,49 %
3	Assets Management	Rp 54.101,151,870,2 58,60  Apakah ada daftar asset tetap ? Ada  Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada  Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada  Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,21 %

## ► Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

#### ► Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0 %
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	66,67 %



# Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



## ► Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tahap penyelenggaraan SAKIP, meliputi penyusunan rencana strategis, penanda-tanganan perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, menyusun pelaporan kinerja, serta melakukan reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan SAKIP tersebut, setiap instansi harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj). Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.



# Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



## ► Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat edaran tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKj menjadi satu-kesatuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Walikota Surabaya Tahun 2023. Indikator dalam PERKIN tersebut disesuaikan dengan penjenjangan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Walikota Surabaya. Penjenjangan tersebut, digambarkan, sebagai berikut:

# MISI

# 1

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional, dengan sasaran pembangunan **Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal.**
- Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, dengan sasaran pembangunan **Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.**

# MISI

# 2

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya, dengan sasaran pembangunan:
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
  - b. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- Pembentukan karakter masyarakat, dengan sasaran pembangunan **Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup.**

# MISI

# 3

Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pembangunan **Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi.**
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah, dengan sasaran pembangunan **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.**

# MISI

# 4

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan sasaran pembangunan:
  - a. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.**
  - b. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.**

# MISI

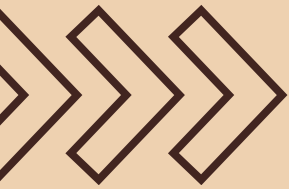
# 5

Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, dengan sasaran pembangunannya:
  - a. **Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
  - b. **Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat.**

Berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indikator yang diukur setiap tahunnya dan dijadikan PERKIN, adalah indikator kinerja level sasaran. Hasil pelaksanaan sasaran Kota Surabaya, rinciannya sebagai berikut:

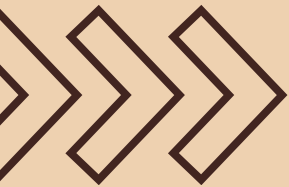


## Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal

Sasaran “Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,70%	0	0	0	3,34%	90,27%
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%	0	0	0	5,48%	141,97%
Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	5,18%	0	0	0	7,84%	151,35%
Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,25%	0	0	0	1,45%	27,62%
Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%	0	0	0	17,17 %	103,43%

Di tahun 2023, sektor strategis berbasis potensi lokal di Kota Surabaya mengalami kenaikan seiring dengan pemberhentian kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat.

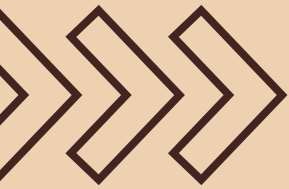


## Meningkatnya Nilai Investasi Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan

Sasaran “Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,83	0	0	0	0,71	114,46%
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	5,50%	0	0	0	7,67%	139,45%
Persentase tenaga kerja yang terserap	21,57%	0	11,%	18%	22,6%	105,10%

Indikator “Indeks Kedalaman Kemiskinan” merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan yang terjadi. Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Surabaya mengalami peningkatan nilai di sebesar 0,02 poin menjadi 0,71 pada tahun 2023. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,18 pada 2022, menjadi 0,16 pada 2023.

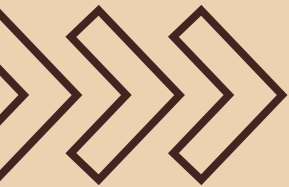


## Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Sasaran “Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Angka Harapan Hidup	74,44	0	0	0	75,82	101,85%
Indeks Pendidikan	78,52	0	0	0	76,92	97,96%
Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,28%	1,68%	1,84%	1,85%	1,47%	135,53%
Skor Pola Pangan Harapan	94	0	0	0	94,34	100,36%

Indikator “Angka Harapan Hidup” adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Surabaya di tahun 2023 mencapai 75,82 tahun, meningkat 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya yaitu 75,62 tahun. **Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 74,7, progres capaiannya mencapai 101,50%.**

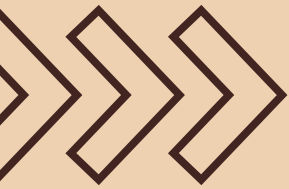


## Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak

Sasaran “Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Pembangunan Gender	93,74	0	0	0	94,21	100,50%

Indikator “Indeks Pembangunan Gender” merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dihitung dari komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Realisasi di tahun 2023 sebesar 94,21. **Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 93,78, progres capaiannya mencapai 100,46%.**



## Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Pada Nilai-Nilai Budaya, Agama Dan Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran “Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Budaya Lokal	89,30	0	0	0	89,99	100,77%
Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46	47,75	49,87	53,14	56,51	100,09%
Indeks Kepedulian Sosial	89,20	0	0	0	97,86	109,71%

Indikator “Indeks Budaya Lokal” dinilai berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Selama periode tahun 2018-2021, Indeks Budaya Lokal digunakan sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang positif terhadap budaya lokal dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. **Realisasi di tahun 2023 sebesar 89,99. Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 90,5, progres capaiannya mencapai 99,44%.**

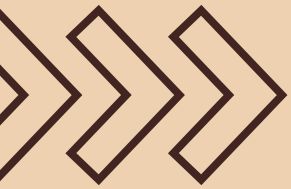


## Tersedianya Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Yang Terintegrasi

Sasaran “Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,800	0,76	16,51	16,31	0,81	101,25%
Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,69	0,22	0,65	0,73	0,74	107,25%
Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,503	0,07	0,37	0,22	0,67	133,20%

Indikator “Indeks Kebinamargaan dan Pematusan” dihitung dengan formula 50% Indeks Bina Marga + 50% Indeks Pematusan. Indeks Bina Marga dihitung dari Persentase jalan dalam kondisi baik (60%) + Tingkat konektivitas jalan (30%) + Persentase ketersediaan prasarana pejalan kaki (10%). Sedangkan, Indeks Pematusan dihitung dari Persentase prasarana drainase berfungsi dengan baik (50%) + Persentase pompa siap operasional (40%) + Persentase penurunan luas genangan (10%). Realisasi di tahun 2023 sebesar 0,81. Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 0,89; progres capaiannya mencapai 91,01%. **Dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,78, realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan.**

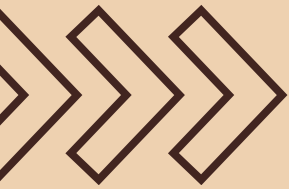


## Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Persampahan	77,54	34,99	34,99	34,99	83,79	108,06%
Indeks Kualitas Air	56,08	56,67	58,00	57,88	58,50	104,32%
Indeks Kualitas Lahan	42,69	42,64	42,64	42,64	42,65	99,91%
Indeks Kualitas Udara	90,33	0	0	0	86,61	95,88%

Indikator “Indeks Persampahan” dihitung menggunakan penjumlahan bobot nilai indikator pengurangan sampah, tingkat pelayanan sampah, dan pengelolaan TPA. Realisasi di tahun 2023 sebesar 83,79. **Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 79,29, progres capaiannya mencapai 105,68%.**



# Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Opini BPK	WTP	0	0	0	WTP	100%
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2	0	0	0	4,49	140,31%
Nilai SAKIP	82,97	0	0	0	83,92	101,14%

Terkait tren realisasi indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” 5 tahun terakhir, nilai SAKIP Kota Surabaya konstan **mengalami kenaikan dengan opini BPK yang selalu WTP**. Sedangkan, terkait indikator Indeks SPBE, di tahun 2020 tidak terdapat realisasi karena tidak menjadi sampling penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rincian realisasi tersebut, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,72	0	3,16	3,69	4,49	3,72
Nilai SAKIP	73,47	75,13	75,34	80,31	83,92	73,47



## Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Inovatif

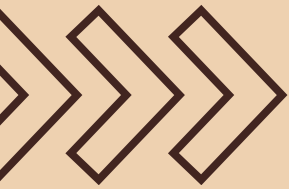
Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Nilai Kepuasan Masyarakat	89,23%	0	0	0	95,82	107,39%

Indikator “Nilai Kepuasan Masyarakat” didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Realisasi di tahun 2023 sebesar 95,82. Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 92,01, progres capaiannya mencapai 104,14%.

Berdasarkan tren realisasi **nilai kepuasan masyarakat, nilai di tahun 2023 meningkat** dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020, nilai kepuasan masyarakat mengalami penurunan karena dampak pandemi yang menerapkan kebiasaan normal baru sesuai protokol kesehatan, dinilai mengurangi kenyamanan dan kepraktisan dalam pelayanan.



## Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran “Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,87	0,96	0,91	0,87	0,90	103,45%

Indikator “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota” diperoleh dari perhitungan rata-rata:

- Penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG);
- Penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Realisasi di tahun 2023 sebesar 0,9. Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 0,9, progres capaiannya mencapai 100%.



## Meningkatnya Kualitas Mitigasi Dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat

Sasaran “Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat” mempunyai indikator dengan capaian, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Indeks Penanggulangan Bencana	0,828	0,84	1,76	2,70	0,92	111,11%

Indikator “Indeks Penanggulangan Bencana” dihitung dari penjumlahan penanganan bencana yang terintegrasi serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi.

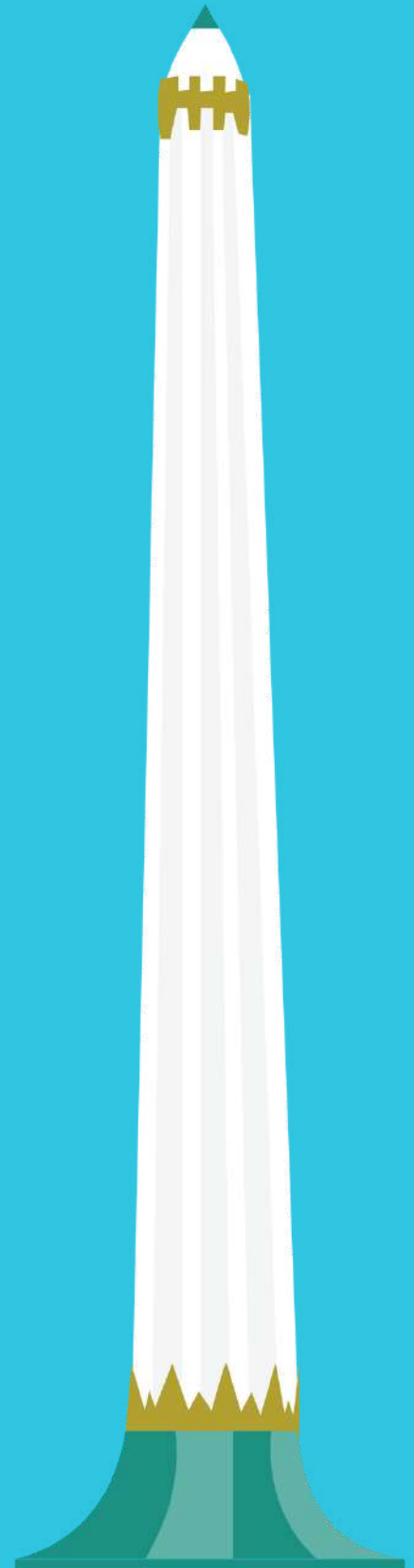
Realisasi di tahun 2023 sebesar 0,92. Dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 0,935, progres capaiannya mencapai 98,40%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk melakukan mitigasi bencana dengan melakukan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama sebanyak 61 Kelurahan, pelatihan pencegahan dan pengurangan resiko bencana sebanyak 72 kali dan diikuti peserta dari unsur sekolah/madrasah, pegawai Rumah Sakit/Puskesmas serta relawan, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta upaya maksimal dalam penanganan korban bencana dan/atau kedaruratan.



# Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan



Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan penugasan urusan pemerintahan Konkuren. Penugasan yang diberikan tersebut disertai dengan Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut, terkait dengan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah sehingga tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dimaksud.





# Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan





## Urusan Pendidikan

### Jenis Pelayanan Dasar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Dasar

Pendidikan Kesetaraan



Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

100%

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

## Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Surabaya

99,34%

Pendidikan Anak  
Usia Dini

99,69%

Pendidikan Dasar

100%

Pendidikan  
Kesetaraan

# Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

96,75%



PAGU

Rp.1.065.965.156.072

REALISASI

Rp.1.031.330.552.746

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024



## Dukungan Personil

Pendidikan Dasar

- 11.450 Guru SD
- 6.284 Guru SMP
- 977 Kepala Sekolah
- 2.236 Tenaga Penunjang Lainnya
- 1.852 Lainnya

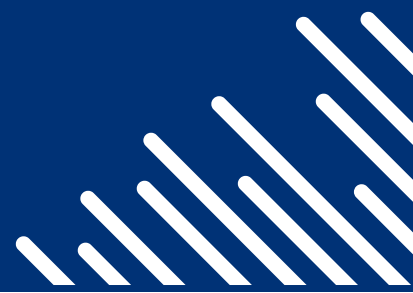
Pendidikan Kesetaraan

- 478 Tutor Pendidikan Kesetaraan
- 34 Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan
- 34 Tenaga Penunjang Lainnya

Pendidikan Anak Usia Dini

- 10.159 Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- 2.612 Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024



# Permasalahan dan Solusi



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Adanya indikator yang sulit dirumuskan dan didapatkan datanya terutama untuk indikator yang berhubungan dengan Rapor Pendidikan Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari referensi pendataan lainnya baik di website Kemendikbud Ristek</li> <li>Merumuskan data yang diminta berdasarkan asumsi</li> </ul>
2	Penghitungan Kebutuhan	Penghitungan kebutuhan data maupun anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM perlu konsentasi tinggi, karena membutuhkan pemahaman yang tinggi dan fokus kepada indikator yang diminta.	Berdiskusi dengan rekan kerja di dalam OPD maupun lintas OPD yang menangani SPM dan meminta arahan pimpinan dalam pengisian SPM.
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Subkegiatan dalam SPM berbeda dengan nama subkegiatan yang ada di Perangkat Daerah.</li> <li>Anggaran di Dinas Pendidikan melekat kepada subkegiatan secara keseluruhan, sehingga apabila diminta breakdown berdasarkan anggaran yang mendukung SPM, maka perlu waktu untuk memetakannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dirumuskan kesamaan nomenklatur nama subkegiatan yang ada di SPM dengan Perangkat Daerah. Dasar nomenklatur yang digunakan Perangkat Daerah adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Adanya fasilitas tagging anggaran SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran pada aplikasi e-budgeting</li> </ul>
4	Pelaksanaan	Pemenuhan SPM di Dinas Pendidikan membutuhkan dukungan data terkait jumlah penduduk usia sekolah, agar Dinas Pendidikan mengetahui jumlah sasaran yang harus dilayani.	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Bapedalitbang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan jumlah penduduk usia sekolah.



## Urusan Kesehatan

### Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

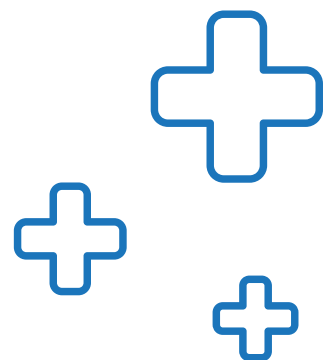


### Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

100%

HOSPITAL



# Realisasi pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Surabaya

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

99.97%

Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 %

Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 %

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 %

Pelayanan Kesehatan Balita 99,6 %

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 %

Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 %

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 %

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 %

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100 %

Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat 100 %

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 %

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 %

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 %

## Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

96,75%

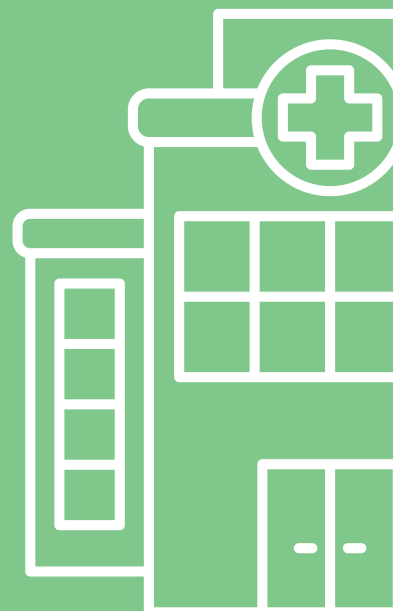
PAGU

Rp.102.777.532.016

REALISASI

Rp.69.048.481.906

70



# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	3.606	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan	3.606	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis Anak	3.588	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.588	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Gizi	492	
		Lainnya		Guru PAUD dan Kader Kesehatan

# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.283	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Gizi	492	
		Tenaga kesehatan masyarakat	291	
		Lainnya		Guru dan Kader Kesehatan
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.283	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Gizi	492	
		Tenaga kesehatan masyarakat	291	
		Lainnya		Tenaga Non Kesehatan Terlatih

# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.672	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Gizi	492	
		Lainnya		Tenaga Non Kesehatan Terlatih
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.672	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Tenaga kesehatan masyarakat	291	
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter	3.283	
		Bidan	1.812	
		Perawat	10.389	
		Gizi	492	
		Tenaga kesehatan masyarakat	291	
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa	63	

# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	3.799	
		Perawat	10.389	
		Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	912	
		Penata Rontgen	442	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	291	
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	3.797	
		Perawat	10.389	
		Bidan	1.812	
		Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	912	
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	291	
		Lainnya		Tenaga Non Kesehatan terlatih

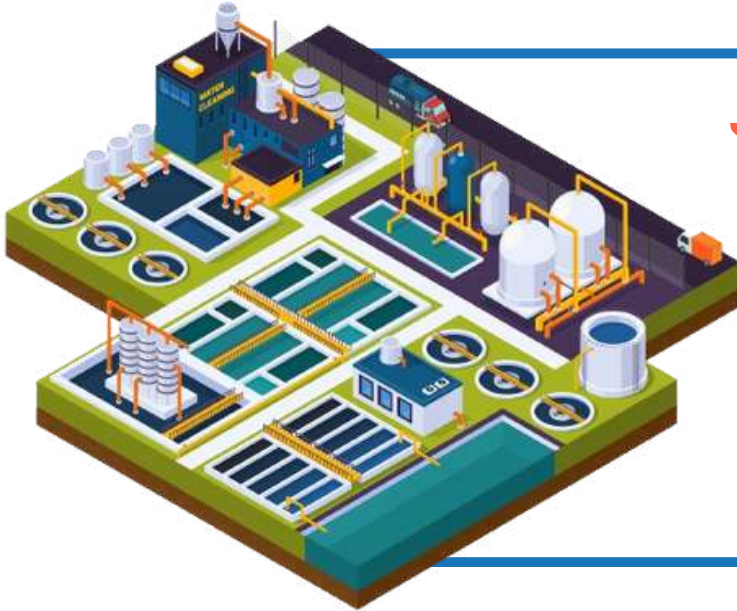
# Permasalahan & Solusi



No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dan kelengkapan pengumpulan data oleh puskesmas</li> <li>Masih ada revisi laporan bulanan puskesmas dan responnya kurang cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab laporan masing-masing puskesmas</li> <li>Melakukan validasi data setiap bulan</li> </ul>
2	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan kebutuhan sarana pendukung SPM dilaksanakan lintas bidang</li> <li>Terdapat satu (1) komponen pendukung yang digunakan oleh beberapa lintas program atau indikator SPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas bidang</li> <li>Memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas bidang serta menyiapkan sistem pencatatan barang yang bisa menelusur langsung ke program</li> </ul>
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua indikator SPM dalam pelaksanaannya mempunyai anggaran tersendiri atau terfasilitasi dengan nomenklatur subkegiatan tersendiri seperti pelayanan ODGJ dan anak usia sekolah dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penganggaran dimasukkan ke subkegiatan lain</li> </ul>
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi SIPTM, aplikasi sayang warga dan simpus tidak bisa btiding, sehingga puskesmas upload dimasingmasing aplikasi</li> <li>HIV : Sebaran populasi kunci yang tidak merata dan kadang tersembunyi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diupayakan antara masing-masing aplikasi dapat terbridging</li> <li>Melakukan mobile testing ke spotspot berisiko dan Bekerjasama secara intensif dengan LSM untuk mengedukasi dan mendorong populasi kunci untuk pelayanan HIV</li> </ul>



## Urusan Pekerjaan Umum



### Jenis Pelayanan Dasar

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari ●

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. ●

### Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

100%

### Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

52,96%

PAGU : Rp.287.506.239.406

REALISASI : Rp.152.270.467.745

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Dinas Sumbr Daya Air dan Bina Marga, 2024

# Dukungan Personil

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

1	Produksi pendistribusian air minum	Karyawan Organik	731 orang	Subdirektorat produksi dan distribusi, pemeliharaan instalansi, pelayanan wilayah timur dan pelayanan wilayah barat
		Karyawan Non Organik	785 orang	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			
	Sub-sistem pengolahan setempat	Dilakukan oleh tenaga fasilitator (TFL), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara	TFL : 4 Orang KSM : 30 Orang KPP : 24 Orang	Melakukan pendampingan, pembangunan dan keberlanjutan program sanitasi berbasis masyarakat
	Sub-sistem pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh armada asset pemerintah</li> <li>Dilakukan oleh armada swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Armada</li> <li>95 Armada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armada asset hanya melayani asset pemerintah kota</li> <li>Armada swasta melayani masyarakat umum</li> </ul>
	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja	Dilakukan Oleh Personil : <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrasi</li> <li>Pengawasan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Perizinan</li> <li>Retribusi</li> <li>Operasional</li> <li>Pengangkutan</li> <li>Perawatan IPAL</li> </ul>	33 Orang	Kegiatan Pengadministrasi, Anggaran, Pengarsipan, Pendataan, Pelayanan IPLT, Penyusunan program/kajian, perizinan, penerimaan retribusi, penyedotan asset dan Perawatan IPAL aset

# Permasalahan dan Solusi

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 2023

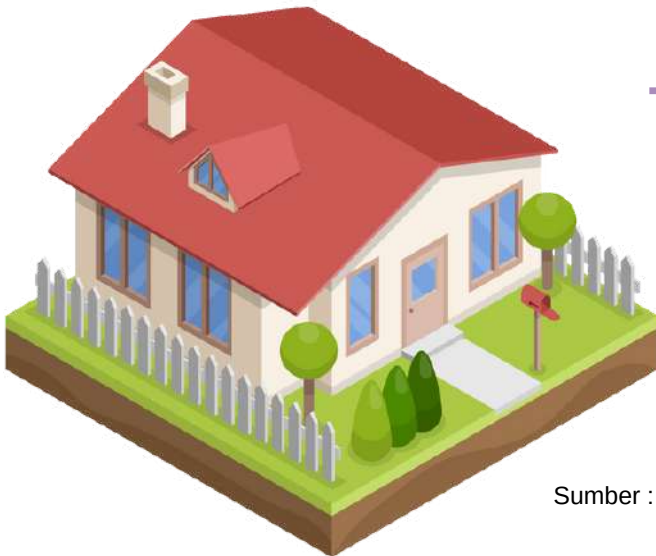
No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data yang dibutuhkan tidak tersedia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi dengan pihak terkait</li></ul>
2	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya pemenuhan SDM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisa ABK</li></ul>
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokasi pelaksanaan sulit</li><li>• Proses PSTJ</li><li>• Perubahan rencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proses re-DED</li><li>• Percepatan proses PSTJ</li><li>• Review ulang DED</li></ul>
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemungkinan gagal lelang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Review KAK</li></ul>



## Urusan Perumahan Rakyat

### Jenis Pelayanan Dasar

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



### Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

100%

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

### Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

100%

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## Alokasi Anggaran

PAGU

**Rp.243,039,601,167**

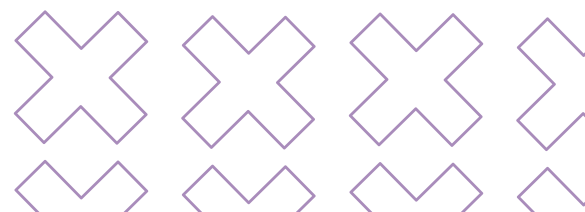
REALISASI

**Rp.222,868,843,208**



## Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	ASN DPRKPP	16 orang
		Tenaga Teknis	26 orang
		Tenaga Administrasi	33 orang
		Tenaga Kebersihan	58 orang
		Tenaga Keamanan	64 orang
		Tenaga Teknis Pemeliharaan Sarna dan Prasarana	77 orang
		ASN dan Non ASN Sub Kegiatan Pembebasan lahan/tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	13 orang
		Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan 2	8 orang
		Pengadilan Negeri Surabaya	4 orang
		Tim Appraisal (dari KJPP)	6 orang



# Permasalahan dan Solusi

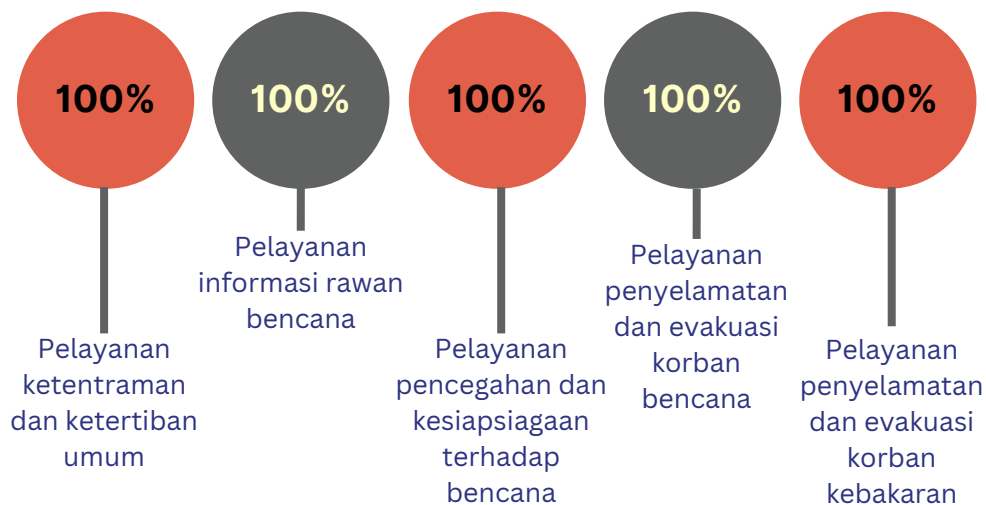
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>Data masyarakat yang dinamis sehingga menimbulkan ketidaksesuaian terhadap data realitas di lapangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengoptimalan penggunaan Aplikasi/pendataan secara elektronik dan terkoneksi dengan data kependudukan lainnya</li></ul>
2	Penghitungan Kebutuhan		
3	Perencanaan dan Penganggaran		
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat rumah yang tidak memiliki sertifikat/tidak jelas hak miliknya sehingga tidak dapat diintervensi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dilakukan intervensi sesuai kebutuhan terlebih dahulu dan diusulkan melalui CSR atau bantuan lainnya</li></ul>
5	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya kemampuan warga yang diintervensi dalam rangka Membayar iuran bulanan rusun</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui program pemberdayaan Bersama OPD terkait</li></ul>



## Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

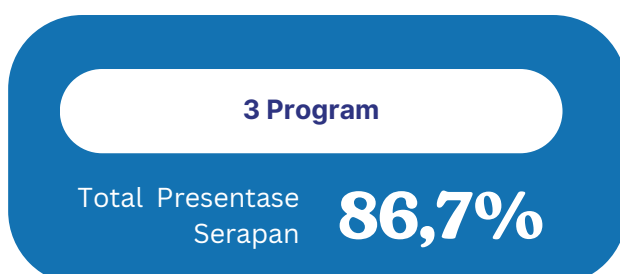
### Jenis Pelayanan & Pencapaian SPM TRANTIBUM Kota Surabaya



### Realisasi Pencapaian SPM



### Alokasi Anggaran



PAGU : Rp.147.721.714.963

REALISASI : Rp.128.056.603.674

# Dukungan Personil

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda	Jabatan Struktural	5 orang	Jumlah karyawan Berdasarkan status apparatur Satpol PP PNS : 94 orang Non PNS : 673 orang
		Jabatan Fungsional	7 orang	
		Staff	100 orang	
		Komandan Kompi	899 orang	
		Komandan Peleton		
		Tenaga Operasional / Administrasi 5	12 orang	
		Petugas CC Room / Administrasi 4		
		Tenaga Operasional / Administrasi 3	12 orang	
		THL	2 orang	
		Petugas Kebersihan	6 orang	
2	Respon Cepat Penanganan Kedaruratan	Tim Respon Cepat	398 orang	

# Dukungan Personil

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pejabat Struktural	5 orang	Jumlah Karyawan berdasarkan status aparatur pemadam kebakaran PNS : 126 Orang Non PNS : 628 Orang
		Sub Koordinator	5 orang	
		Staf/karyawan Dinas	93 orang	
		Tim Rescue	58 orang	
		Tim Command Center	11 orang	
		Posko Terpadu	18 orang	
		Kepala Rayon	5 orang	
		Koordinator Pos	17 orang	
		Komandan Pleton	15 orang	
		Komandan Regu	114 orang	
		Juru Mudi	130 orang	
		Pemadam	297 orang	

# Permasalahan dan Solusi

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2024

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data pemetaan wilayah terkait mitigasi potensi bencana kebakaran di lingkungan padat penduduk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan analisa atas data pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulai di masyarakat (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan) yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya untuk memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi</li></ul>
2	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya peraturan terbaru terkait kebutuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran yang perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru terkait penerapan SPM tahun 2023</li><li>• Perlunya perencanaan kebutuhan untuk tahun anggaran 2024 yang segera harus terpenuhi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan analisa terkait peraturan terbaru dan memetakan apa saja yang perlu dilakukan dalam penyesuaian pelaksanaan dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya</li><li>• Melakukan analisa kembali terkait kebutuhan khususnya sarana dan prasarana yang dapat dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2023</li></ul>
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intensitas kejadian penyelamatan triwulan III mengalami kenaikan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan evaluasi menyeluruh disemua tingkatan/level dan disetiap bidang dan sub bagian terkait pelaksanaan penyelamatan non kebakaran, serta melakukan peningkatan kesiapsiagaan tim rescue untk menyelesaikan setiap permohonan yang diterima</li></ul>



## Urusan Sosial

### Jenis Pelayanan & Pencapaian SPM Urusan Sosial

Pelayanan sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti **100%**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti **100%**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti **100%**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luarpanti **100%**

Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota **100%**

### Realisasi Pencapaian SPM

5 Program

100 %



Alokasi Anggaran **84,04 %**

Pagu **Rp.32.741.701.084**

Realisasi **Rp.27.515.612.949**



# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Tenaga Administrasi	4 orang
		Tenaga Pedamping	9 orang
		Petugas Keamanan	3 orang
		Petugas Kebersihan	3 orang
		Fisioterapi	2 orang
		Juru Masak	2 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Ka. PTD	1 orang
		Kasubag TU	1 orang
		Staf PNS	2 orang
		Tenaga Pembina	3 orang
		Tenaga Pendamping	7 orang
		Petugas Keamanan	3 orang
		Petugas Kebersihan	4 orang
		Juru Masak	2 orang
Sopir	1 orang		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Ka. UPTD	1 orang
		PNS	4 orang
		Tenaga Administrasi	1 orang



# Dukungan Personil

Sumber : Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Tenaga Pendamping/Perawat	34 orang
		Petugas Keamanan	11 orang
		Petugas Kebersihan	18 orang
		Admin	1 orang
		Juru Masak	6 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan	PNS	3 orang
		Tenaga Administrasi	6 orang
		Tenaga Perawat	23 orang
		Tenaga Pendamping	23 orang
		Petugas Keamanan	18 orang
		Petugas Kebersihan	29 orang
		Pendamping	4 orang
		Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1 orang
		Tenaga Sopir	2 orang
Juru Masak	14 orang		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Tim Respon Cepat	420 orang



## Program & Kegiatan

### ▶ Urusan Pendidikan

#### **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

### ▶ Urusan Kesehatan

#### **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### ▶ Urusan Pekerjaan Umum

#### **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

#### **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Operasi dan pemeliharaan Sistem



## Program & Kegiatan

### ▶ Urusan Perumahan Rakyat

#### **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya**

- Pembebasan Lahan / Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

### ▶ Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### **Program Peningkatan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

#### **Program Penanggulangan Bencana**

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

#### **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran



## Program & Kegiatan

### ▶ Urusan Sosial

#### Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota



# Penutup



Pelaksanaan kegiatan - kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang, berikut alokasi dana dan realisasinya selama tahun 2023 telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya indikator pembangunan yang menunjukkan hasil yang baik, namun di sisi lain juga dapat dilihat adanya beberapa indikator pembangunan yang belum mencapai target dan membutuhkan perhatian kita bersama guna menjadikan Kota Surabaya lebih baik lagi kedepannya.

Hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholder*) baik itu pemerintah, swasta serta masyarakat Kota Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud dengan baik. Tantangan terbesar Kota Surabaya adalah menyiapkan Kota Surabaya agar tidak termarginalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Surabaya yaitu :



**“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”**

Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2023 ini sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri melalui Ibu Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat. Atas segala perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Gubernur terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Surabaya disampaikan ucapan terima kasih.

Surabaya, 27 Maret 2024



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :  
Walikota Surabaya


ERI CAHYADI, S.T., M.T



## PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA

### BAGIAN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA

 [pemerintahan.surabaya.go.id](http://pemerintahan.surabaya.go.id)

 (031) 531-2144

**Alamat**

Gedung Pemerintahan Kota Surabaya Lt. IV  
Jl. Jimerto 25 - 27 Kel. Genteng  
Kec. Ketabang - Kota Surabaya